



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 266 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan review serta evaluasi kinerja secara sistematis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah keputusan yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 - c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas di maksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai Tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
4. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Masing-masing Tim untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 266 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. TIM PENGARAH:

- a. Ketua : Bupati Banggai Kepulauan

II. TIM PENANGGUNG JAWAB:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
b. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum

III. TIM PELAKSANA:

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan
b. Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat
c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
d. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan
e. Tim Penyusun :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Inspektur Pembantu Wilayah II
3. Inspektur Pembantu Wilayah III
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
5. Kepala Bid. Perencanaan Ekonomi
6. Kepala Bid. Perencanaan Sosial Budaya
7. Kepala Bid. Perencanaan Pembangunan Makro
8. Kepala Bid. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
9. Kepala Bid. Penelitian dan Pengembangan
10. Kepala Sub Bid. Perencanaan Ekonomi I
11. Kepala Sub Bid. Perencanaan Ekonomi II
12. Kepala Sub Bid. Perencanaan ekonomi III
13. Kepala Sub Bid. Perencanaan Sosial Budaya I
14. Kepala Sub Bid. Perencanaan Sosial Budaya II
15. Kepala Sub Bid. Perencanaan Sosial Budaya III
16. Kepala Sub Bid. Perencanaan Makro
17. Kepala Sub Bid. Data dan Pelaporan
18. Kepala Sub Bid. Pengendalian Evaluasi, Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan
19. Kepala Sub Bid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
20. Kepala Sub Bid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II
21. Kepala Sub Bid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III
22. Kepala Sub Bid. Penelitian Fisik Prasarana, SDA dan Lingkungan Hidup
23. Kepala Sub Bid. Penelitian Ekonomi dan Sosial Budaya
24. Kepala Sub Bid. Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum
25. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat
26. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Inspektorat


AK

- 27. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Inspektorat
- 28. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 29. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- 30. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik

f. Tim Pendukung :

- 1. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 2. Staf Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
- 3. Staf pada Bag. Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab, Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



h. RAIS D. ADAM